

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN HASIL KEPUTUSAN IJTIMA IV  
TENTANG NKRI SYARIAH DI REPUBLIKA.CO.ID EDISI AGUSTUS  
2019**



**Skripsi**

**Diajukan Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:**

**Umi Mungajubah  
NIM 15210085**

**Pembimbing:**

**Khoiro Ummatin, S. Ag., M. Si  
NIP 197103281997032001**

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Umi Mungajubah (15210085), 2020, Penelitian yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Hasil Keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI Syariah di Republika.co.id Edisi Agustus 2019” bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dilakukan Republika.co.id dalam melakukan pemberitaan isu NKRI syariah.

GNPF-ulama sebagai pendukung Prabowo, melahirkan kembali ijtima ulama yang ketiga dan keempat kalinya dengan tujuan mengajukan gugatan melalui mekanisme legal terkait tuduhan adanya kecurangan pada menangnya Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Dari sekian banyaknya hasil keputusan pada ijtima tersebut, terdapat satu rekomendasi yang menarik perhatian media, yaitu penggunaan istilah NKRI syariah. Media tidak menampilkan Isu NKRI syariah ini sebagai upaya taat kepada Allah dengan tetap menjadi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pihak penyelenggara. Melainkan menampilkan sebagai upaya untuk menjadikan syariah sebagai dasar negara di Indonesia. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa media menggiring opini bahwa NKRI syariah ini bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media. Republika.co.id merupakan salah satu media yang turut memberitakan isu NKRI syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana konstruksi pemberitaan isu NKRI syariah di Republika.co.id.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan framing Robert N. Entman yang analisisnya dijelaskan secara deskriptif. Subjek penelitian ini ialah portal berita Republika.co.id, sedangkan objek penelitian adalah konstruksi pemberitaan isu NKRI Syariah sebanyak 8 teks berita pada kolom politik pada kurun waktu 6 hingga 14 Agustus 2019. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berita.

Hasil dari penelitian ini adalah Republika.co.id mengkonstruksi isu NKRI syariah ini merupakan permasalahan ideologi sebagai bingkai utama. Sebagaimana yang digambarkan pada *Define Problems* persoalan isu NKRI syariah disorot sebagai ancaman ideologi. *Diagnosa Causes* apa yang menjadi penyebab masalah pada isu ini yaitu karena rekomendasi NKRI syariah bertentangan dengan Pancasila. Pada *Make Moral Judgements* Republika.co.id lebih menekankan pada pernyataan bahwa Indonesia bukan negara agama. *Treatment Recommendation* yang Republika.co.id ajukan sebagai bentuk penekanan penyelesaian masalah pada isu ini berupa menolak rekomendasi mewujudkan NKRI syariah.

Kata kunci: Konstruksi, Framing, Realitas.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Mungajubah  
NIM : 15210085  
Jenjang/Jurusan : S1/Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Framing Hasil Keputusan Ijtima Ulama IV Tentang NKRI Syariah di Republika.co.id Edisi Agustus 2019** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang menyatakan,



**Umi Mungajubah**  
**NIM. 15210085**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

---

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Umi Mungajabah

NIM : 15210085

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Analisis Framing Pemberitaan Hasil Keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI Syariah di Republika.co.id Edisi Agustus 2019

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Nanang Mizwar M, S.Sos., M.Si

NIP. 19840307 201101 1 013

Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.

NIP. 19710328199703 2 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1224/Un.02/DD/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PEMBERITAAN HASIL KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA IV  
TENTANG NKRI SYARIAH DI REPUBLIKA.CO.ID EDISI AGUSTUS 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI MUNGAJUBAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15210085  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5f12696c135a



Penguji I  
Mohammad Zamroni, S.Sos.L.M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5f1e72d6f6fd



Penguji II  
Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5f6c2a7623b1b



Yogyakarta, 22 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 5f73a6ff139c0d

## MOTO

*Push Your Limits*

-Anonim-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis yang tak hentinya mendo'akan dan mendukung sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Keluarga, sahabat, dan teman-teman semuanya serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan nikmat yang dilimpahkanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Hj. Ema Marhumah, M.Pd.
3. Ketua Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Khoiro Ummatin, S, Ag., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M. Si. terimakasih atas semua ilmu dan bimbinganya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan di Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terimakasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                | i    |
| ABSTRAK .....                                                                                      | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASIAN SKRIPSI .....                                                             | iii  |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                                    | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                            | vi   |
| MOTO .....                                                                                         | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                          | viii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                               | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                    | ix   |
| BAB I.....                                                                                         | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                                                                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                           | 4    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                          | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                         | 5    |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                             | 5    |
| F. Kerangka Teori.....                                                                             | 9    |
| G. Kerangka Berpikir .....                                                                         | 17   |
| H. Metode penelitian .....                                                                         | 19   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                                    | 24   |
| BAB II.....                                                                                        | 24   |
| GAMBARAN UMUM .....                                                                                | 24   |
| A. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Republika Online.....                                        | 24   |
| B. Gambaran Umum Ijtima Ulama I sampai IV .....                                                    | 26   |
| C. Pemberitaan Hasil Keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah di Republika.co.id.....        | 37   |
| BAB III .....                                                                                      | 41   |
| PEMBAHASAN .....                                                                                   | 41   |
| A. Analisis Framing Model Robert Entman pada Pemberitaan Isu NKRI Syariah di Republika.co.id ..... | 41   |
| B. Konstruksi Pemberitaan Republika.co.id Terkait Isu NKRI Syariah.....                            | 72   |

|                        |    |
|------------------------|----|
| BAB IV .....           | 79 |
| PENUTUP.....           | 79 |
| A. Kesimpulan.....     | 79 |
| B. Saran.....          | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 83 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kontestasi pilpres 2019 menghadirkan dua pasangan calon presiden yang terdiri dari kubu penantang yaitu Prabowo sedangkan dari kubu pertahana yaitu Jokowi. Kedua kubu tersebut berlomba-lomba dalam meraup sebanyak-banyaknya suara masyarakat. Berbagai strategi digunakan untuk mendulang suara dimana masyarakat Indonesia ini didominasi oleh pemeluk Islam.

Politik identitas khususnya agama memang tidak pernah mati dalam arena politik di negeri ini. Politik identitas pada pilpres 2019 menjadi salah satu cara yang digunakan kedua kubu tersebut untuk unggul dalam mendulang suara umat muslim di Indonesia. Kyai dan ulama mempunyai peranan yang besar untuk meraih simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan muslim. Hal ini dapat dilihat dari kedua kontestan pilpres yang sama-sama menggandeng tokoh agama Islam sebagai pasangan maupun pendukungnya. Jokowi menjadikan petinggi MUI sekaligus Nahdatul Ulama, Ma'ruf Amin sebagai wakil presidenya. Sedangkan, Prabowo mengahdiri pertemuan dengan para politikus dan ulama yang kemudian pertemuan tersebut di klaim sebagai "ijtima ulama". Pertemuan tersebut merupakan ijtima ulama pertama yang kemudian menghasilkan keputusan politik berupa dukungan kepada Prabowo pada pilpres 2019.

Kontestasi pilpres 2019 dimenangkan oleh kubu pertahana Jokowi-Ma'ruf. Namun, kemenangan tersebut dibantah oleh Prabowo dengan menuding telah terjadi kecurangan pada pilpres 2019 yang dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis. Maka dari itu GNPF-ulama sebagai bagian dari pendukung Prabowo, melahirkan kembali ijtima ulama yang ketiga kalinya dengan tujuan mendorong dan meminta Prabowo untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal dan prosedural terkait kecurangan tersebut.

Rupaya persoalan diatas tidak cukup pada ijtima ulama III. Para inisiator penyelenggara ijtima kembali membuat forum lanjutan yang keempat yaitu ijtima ulama IV. Secara garis besar ijtima ulama IV menyatakan penolakan terhadap kekuasaan yang diklaim dilandasi kecurangan dan kedzaliman. Terdapat 8 poin utama dan 6 poin turunan pada keputusan yang dihasilkan oleh ijtima ulama IV. Dari sekian banyaknya hasil keputusan pada ijtima tersebut, terdapat satu rekomendasi yang menarik perhatian media. Salah satu keputusan tersebut merokemendasikan untuk terwujudnya NKRI syariah berdasarkan Pancasila yang tertuang pada putusan nomor 3 poin 6.

Isu NKRI syariah ramai diperbincangkan oleh media pada Agustus 2019. Media menyoroti adanya penggunaan istilah NKRI syariah pada salah satu keputusan ijtima ulama IV. Isu NKRI syariah ini tidak ditampilkan sebagai upaya taat kepada Allah dengan tetap menjadi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pihak penyelenggara. Melainkan ditampilkan oleh media sebagai upaya untuk

menjadikan syariah sebagai dasar negara di Indonesia. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa media menggiring opini bahwa NKRI syariah ini bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Isu NKRI syariah ini mendapat tanggapan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, ia meminta komitmen bersama bahwa bangsa Indonesia ini milik bersama. Maka dari itu menurut Hariyono tidak boleh mengutamakan salah satu agama saja.<sup>1</sup> Tanggapan lain juga datang dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla, ia meminta untuk tidak alergi terhadap kata syariah. Karena pada dasarnya syariah merupakan hukum agama Islam yang mengatur kehidupan umat muslim. Meskipun demikian, JK menegaskan bahwa pertemuan ijtima ulama tersebut tidak mewakili pendapat ulama secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Independen dan objektif merupakan dua kata kunci yang menjadi kiblat dan klaim setiap pelaku jurnalis di seluruh dunia. Pelaku jurnalis menyatakan bahwa ia telah bertindak objektif, seimbang, dan tidak berpihak pada kepentingan apapun kecuali keprihatinan atas hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.<sup>3</sup>

Meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita seringkali mendapatkan suguhan berita beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama,

---

1 Ratna Puspita, "BPIP Respon Hasil Ijtima Ulama Soal Indonesia Bersyariah", *Republika.co.id*, <https://republika.co.id/berita/pvtf2e428/bpip-respons-hasil-ijtima-ulama-soal-indonesia-bersyariah>, diakses tanggal 12 April 2020.

2 Fauziah Mursid, "Wapres JK: Tak Perlu Alergi dengan Kata Syariah", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/08/06/pvtguh377-wapres-jk-tak-perlu-alergi-dengan-kata-syariah>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

<sup>3</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm.v.

media tertentu mewartakannya dengan menonjolkan sisi atau aspek tertentu.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan media bukanlah saluran yang bebas. Media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas. Media seperti kita lihat, justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas. Tidak mengherankan jikalau kita setiap hari secara terus menerus menyaksikan bagaimana peristiwa yang sama bisa diperlakukan berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada yang menganggap penting, ada yang tidak menganggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media.<sup>5</sup>

Republika.co.id merupakan salah satu media yang turut memberitakan isu NKRI syariah. Adapun, isu NKRI syariah ini merupakan isu yang segar dan baru pada penghujung tahun 2019. Berangkat dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana konstruksi pemberitaan isu NKRI syariah di Republika.co.id.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yang dibangun Republika.co.id dalam memberitakan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah?

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.v.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh Republika.co.id dalam memberitakan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah edisi Agustus 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya kajian teks media (framing).
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan referensi

#### Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pembaca agar lebih kritis dalam mengonsumsi pesan yang diberikan media massa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi masukan bagi para pelaku media dalam penyampaian pesan dan kesan melalui teks media.

### **E. Kajian Pustaka**

Telah banyak dilakukan penelitian dengan metode yang sejenis, meskipun penelitian sebelumnya mengangkat isu yang berbeda. Untuk menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya dan juga untuk memperlihatkan kedudukan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Maka, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang berjudul *Analisi Framing Robert N. Entman Terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Republika online*. Penelitian ini ditulis Fatkhur Rizqi, mahasiswa Progam Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIN Purwokerto. Penelitian Fatkhur membahas frame pemberitaan pembubaran HTI di Republika online. Adapun hasil penelitian tersebut berupa (1) *Define problems* dari Republika online mendefinisikan pembubaran HTI sebagai tindakan yang tergesa-gesa akibat cara pandang pemerintah yang melihat HTI sebagai organisasi radikal yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. (2) *Diagnose causes* dari Republika online menyoroti adanya tindakan pemerintah yang tergesa-gesa memutuskan untuk membubarkan HTI tanpa diadakan dialog bersama pihak terkait. (3) *Make moral judgement* dari Republika online mengarahkan agar diberikan jalan hukum bagi HTI. (4) *Treatment recommendation* dari Republika online menekankan penyelesaian masalah bahwa seharusnya pemerintah mempersilahkan HTI mengambil langkah hukum agar segera memproses ke peradilan atas pembubaran tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan HTI itu sendiri.

Perbedaan penelitian Fatkhur dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Penelitian Fatkhur fokus mengkaji pemberitaan pembubaran HTI. Sedangkan, penelitian ini fokus mengkaji pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah. Adapun persamaan penelitian terletak pada subjek kajian. Penelitian Fatkhur maupun penelitian ini mengkaji satu subjek kajian yang sama yaitu portal berita media online Republika. Persamaan lainnya

terletak pada penggunaan model analisis. Penelitian ini menggunakan model analisis model Robert N. Entman, begitupula dengan penelitian Fatkhur.<sup>6</sup>

*Kedua*, Penelitian yang berjudul *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Pusi Sukmawati dalam Republika Online Edisi 3-5 April 2018*. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Arwani, mahasiswa Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Walisongo Semarang. Penelitian Muhammad bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pembingkaiian yang dilakukan Republika online dalam memberitakan kasus puisi Sukmawati selama masa pemberitaan 3-5 April 2018. Adapun hasil penelitian ini berupa (1) Pada tanggal 3 April 2018 yang ditampilkan oleh Republika online adalah frame hukum. Pada tanggal tersebut semua pemberitaan tersebut dikaitkan dengan ranah hukum. Republika online pun mencoba memberi solusi penyelesaian ke ranah hukum. (2) Pada tanggal 4 April 2018 frame yang ditampilkan Republika online berupa frame moral. Semua pemberitaan pada tanggal tersebut Republika online bawa kedalam perkara moral yang dapat diselesaikan dengan kedamaian. (3) Pada tanggal 5 April 2018 frame yang dibangun Republika online adalah berupa frame moral yang terkait hukum. Semua pemberitaan pada tanggal tersebut dikaitkan dengan perkara moral yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum ataupun damai. Semua penyelesaian diserahkan kepada yang melaporkan Sukmawati.

Persamaan penelitian Muhammad dengan penelitian ini terletak pada model analisis yang digunakan. Analisis penelitian ini menggunakan model

---

<sup>6</sup> Fatkhur Rizqi, *Analisis Framing Robert N. Entman Terhadap Berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia*, Skripsi (Purwokerto: Progam Studi KPI Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2018).

Robert N. Entman. Begitupun juga dengan model analisis yang digunakan oleh penelitian Muhammad. Persamaan lainnya terletak pada subjek penelitian. Penelitian Muhammad dan penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu portal berita online Republika. Adapun perbedaan yaitu terletak pada objek kajian penelitian. Penelitian ini mengkaji pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah. Sedangkan, penelitian Muhammad mengkaji pemberitaan masalah puisi Sukmawati.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul *Frame Pemberitaan Terkait Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Tahun 2018 di Media Republika Online*. Penelitian tersebut ditulis oleh tiga peneliti yang terdiri dari Sendi Romadhon Simorangkir dan Kamalludin, Mahasiswa Progam Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Yono, Mahasiswa Progam Studi Ahwal Alsyakhshiyah Universitas Ibn Khaldun Bogor. Penelitian Sendi dkk menjelaskan bagaimana framing yang dibangun Republika online dalam membuat berita terkait reuni Persaudaraan Alumni 212. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar Republika online mendukung pelaksanaan reuni PA 212. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut, (1) Pada *define problems* Republika online mendefinisikan peristiwa tersebut sebagai masalah sosial, politik dan hukum. (2) Pada *diagnose causes* Republika online menyatakan isu politik praktis dan kampanye Pilpres 2019 terselubung dengan acara reuni tersebut. (3) Pada *make moral jugment* Republika online memberikan keputusan bahwa reuni PA 212 merupakan bentuk kebersamaan dan kecintaan umat islam kepada allah SWT, dan Republika online

---

<sup>7</sup> Muhammad Arwani, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati dalam republika Online Edisi 3-5 April 2018*, Skripsi (Semarang: Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Walisongo, 2019).

juga memberi keputusan bahwa Prabowo tidak melakukan kampanye terselubung melainkan hanya memenuhi undangan reuni PA 212. (4) Pada *treatment recommendation* Republika online menekankan penyelesaian terhadap pihak yang ingin menggagalkan reuni PA 212, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk peringatan agar masyarakat menjaga persatuan, ketertiban dan kedamaian pada saat pilpres 2019.

Perbedaan penelitian Sendi dkk dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian Sendi dkk mengkaji pemberitaan terkait reuni PA 212, sedangkan penelitian ini mengkaji pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI bervariasi. Adapun persamaan penelitian terdapat pada objek kajian. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan Republika online. Persamaan lainnya terletak pada model analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis framing Model Robert N. Entman. Begitupun juga dengan model analisis yang digunakan oleh penelitian Sendi dkk.<sup>8</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teks Berita dalam Pandangan Konstruksionis**

Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman.<sup>9</sup> Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah atau diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi.<sup>10</sup> Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa nenounyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.

---

<sup>8</sup> Sendi Romadhon Simorangkir, Kamalludin, Yono, "Frame Pemberitaan Reuni Persaudaraan Alumni 212 pada tahun 2018 di Media Republika Online", *Jurnal of Communication science and Islamic Da'wah*, vol. 3(1) (2019), hlm. 177.

<sup>9</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*, hlm.15.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.18.

Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Konstruksi yang mereka buat itu dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, bahwa apa yang mereka katakan dan percayai itu adalah benar adanya, punya dasar yang kuat.<sup>11</sup>

Selain plural, konstruksi sosial itu juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka realitas itu merupakan realitas subjektif dan realitas objektif sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas juga mempunyai dimensi objektif-sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar- atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan. Hal itu misalnya dapat dilihat dari rumusan, institusi, aturan-aturan yang ada, dan sebagainya. Sebaliknya, di dalamnya juga terkandung realitas subjektif pandangan individu ketika berhadapan dan bersinggungan dalam menafsirkan peristiwa. Dalam perspektif konstruksi sosial, kedua realitas tersebut saling berdialektika. Seseorang akan mencurahkan ketika bersinggungan dengan kenyataan (ekternalisasi), sebaliknya. Ia juga akan dipengaruhi oleh kenyataan objektif yang ada (internalisasi).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 19.

Menerapkan gagasan Berger mengenai konstruksi realitas dalam berita, maka sebuah teks berupa berita harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi berita yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dilihat dari bagaimana mereka mengonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. Dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. aneka peristiwa. Proses selanjutnya adalah internalisasi. Aneka peristiwa diinternalisasi dengan cara dilihat dan diobservasi oleh wartawan. Terjadi proses dialektika antara apa yang ada dalam pikiran wartawan dan apa yang dilihat oleh wartawan.<sup>13</sup>

## 2. Fakta dan Berita dalam Paradigma Konstruksionis

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut akan diuraikan satu per satu di bawah ini.

### a. Fakta/Peristiwa adalah Hasil Konstruksi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Maka dari itu, realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.<sup>14</sup>

b. Media Adalah Agen Konstruksi

Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakanya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, melainkan juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Apa yang tersaji dalam berita yang kita baca tiap hari adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.<sup>15</sup>

c. Berita Adalah Konstruksi dari Realitas

Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

fakta itu dipahami dan dimaknai.<sup>16</sup> Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir di hadapan khalayak.<sup>17</sup>

d. Berita Bersifat Subjektif/Konstruksi atas Realitas

Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber lain; menempatkan wawancara seorang tokoh lebih benar dari tokoh lain; liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain; tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok; semuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan. Konstruksi wartawan dalam memaknai realitas yang secara strategis menghasilkan laporan semacam itu. Praktik membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu satu lebih penting dibandingkan pandangan kelompok lain dianggap sebagai praktik jurnalistik oleh pendekatan konstruksionis. Karena itu, untuk mengerti kenapa praktik jurnalistik bisa semacam itu bukan dengan meneliti sumber bias, melainkan mengarahkan pada bagaimana peristiwa dikonstruksi dianggap sebagai praktik jurnalistik oleh pendekatan konstruksionis. Karena itu, untuk mengerti kenapa praktik jurnalistik

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

bisa semacam itu bukan dengan meneliti sumber bias, melainkan mengarahkan pada bagaimana peristiwa dikonstruksi.<sup>18</sup>

e. Wartawan Adalah Agen Konstruksi Realitas

Dalam pandangan konstruksionis, wartawan dipandang sebagai aktor/agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi, secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.<sup>19</sup>

f. Etika, Pilihan Moral, dan Keberpihakan Wartawan Adalah Bagian yang Integral dalam Produksi Berita.

Dalam pendekatan konstruksionis memandang wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya sebagaimana apa yang dia lihat.<sup>20</sup> Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu. Hal tersebut adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengonstruksi realitas. Wartawan di sini bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. Karenanya, fungsi tersebut, wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, melainkan mengonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati.<sup>21</sup>

g. Nilai, Etika dan Pilihan Moral Peneliti Menjadi Bagian dalam Penelitian.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruksionis adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas dari nilai pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang terpisahkan dari proses penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian yang berkategori konstruksionis, pilihan moral dan keberpihakan justru sukar dihilangkan dalam penelitian. Peneliti bukanlah robot yang seolah-olah makhluk netral dan akan menilai realitas tersebut apa adanya. Sebaliknya, peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda. Karenanya, bisa jadi objek penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang berbeda di tangan peneliti yang berbeda. Penelitian dengan konstruksinya masing-masing akan menghasilkan temuan yang berbeda pula.<sup>23</sup>

#### h. Khalayak Mempunyai Penafsiran Tersendiri atas Berita

Kaum konstruksionis memandang khalayak sebagai subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Dalam bahasa Stuart Hall, makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan/berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial mempunyai banyak arti (*polisemi*). Makna lebih tepat dipahami bukan sebagai suatu transmisi (penyebaran) dari pembuat berita ke pembaca. Ia lebih tepat dipahami sebagai suatu praktik penandaan. Karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks sama. Kalau saja ada makna

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

yang dominan atau tunggal, itu bukan berarti makna terdapat dalam teks, melainkan begitulah praktik penandaan yang terjadi.<sup>24</sup>

### 3. Analisis Framing

Framing adalah suatu pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan oleh media.<sup>25</sup> Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.<sup>26</sup>

Ada dua aspek dalam framing. *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*include*) dan apa yang dibuang (*exclude*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain.<sup>27</sup>

*Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah ada dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian kata yang mencolok, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.<sup>28</sup>

#### **G. Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini penulis mencoba menyajikan bagaimana konstruksi Republika.co.id dalam memberitakan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah dengan menggunakan analisis framing serta pendekatan dari Robert N. Entman. Menurut Entman untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

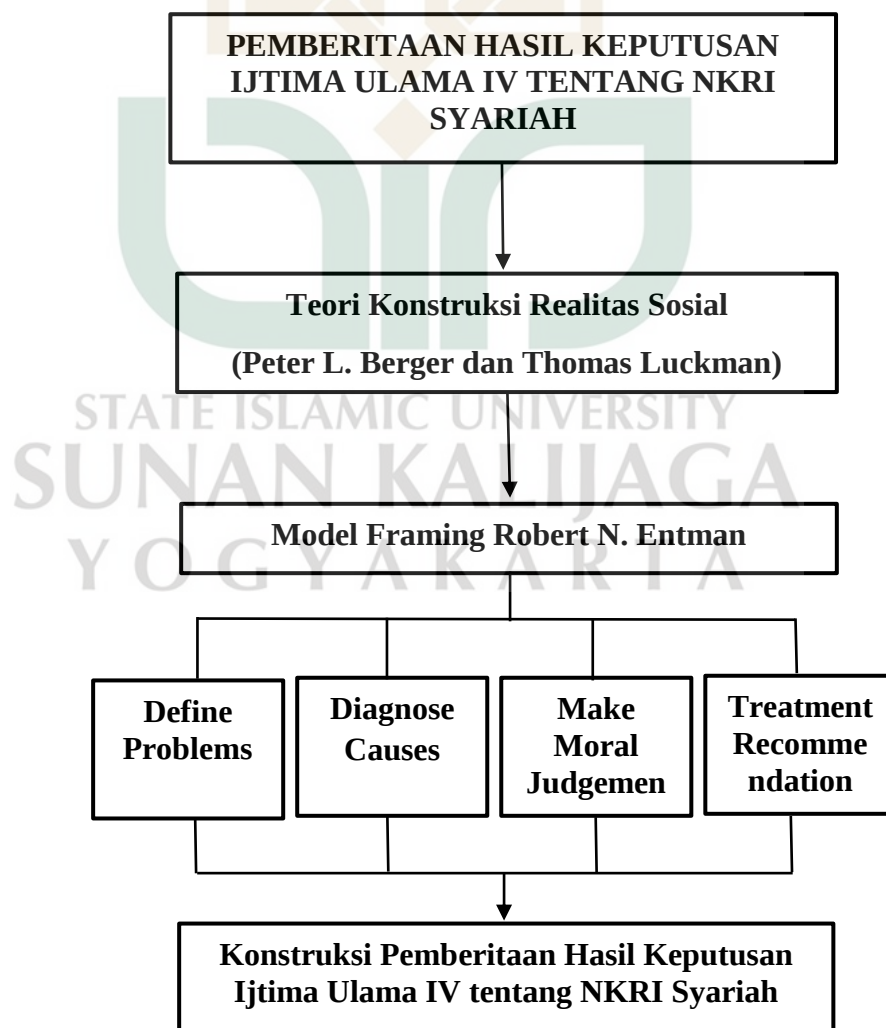
<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

berita dapat dilakukan dengan melihat elemen *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *treatment recommendation* (menekankan masalah).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran guna mempermudah penulis dalam meneliti pemberitaan tentang isu NKRI syariah di Republika.co.id sebagai berikut.

Gambar 1

Bagan Kerangka Berpikir



## H. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan framing model Robert N. Entman. Adapun data yang menjadi bahan analisis pada penelitian ini berupa naskah-naskah pemberitaan terkait isu NKRI syariah yang terdapat di [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada kolom politik.

### 1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini menggunakan portal berita online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang memberitakan terkait isu NKRI syariah. Sedangkan, Objek penelitian ini adalah teks pemberitaan isu NKRI syariah pada laman [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Objek yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini berupa framing yang dibentuk oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Objek penelitian ini mengkaji bagaimana [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memahami dan mengemas isu NKRI syariah pada teks-teks berita yang ditampilkan.

### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berita. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun berita hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah di portal berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id).

Pada periode Agustus 2019 [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memuat 17 pemberitaan terkait isu NKRI syariah. Sejumlah berita tersebut dimuat pada 6 kolom yang

berbeda. Ada 8 berita terkait NKRI syariah di kolom politik, 5 berita di kolom khazanah, dan 1 berita pada masing-masing kolom hukum, umum, dan wacana. Dalam penelitian ini, pemilahan berita yang dihimpun dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) hanya yang terdapat di rubrik politik pada kurun waktu 6 sampai 14 Agustus 2019. Rubrik politik dipilih karena rubrik tersebut memiliki jumlah berita terbanyak dibandingkan rubrik lain yang terdapat pada [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Banyaknya kuantiti berita tersebut dipandang akan memudahkan peneliti untuk menganalisis bagaimana framing yang dibangun [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terkait pemberitaan tentang isu NKRI syariah.

### 3. Teknik analisis data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis framing model Robert N. Entman. Peneliti memilih model analisis dari Robert Entman karena perangkat framing yang dimiliki Entman akan membantu dalam mendefinisikan masalah. Kemudian, juga dapat memperkirakan penyebab masalah dari isu atau tersebut. Oleh sebab itu, perangkat framing pada model ini dianggap membantu peneliti dalam mencari tahu makna yang dibangun atas isu tertentu oleh media.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan

mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana- penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.<sup>29</sup>

Gambar 2

Tabel Perangkat Framing Entman

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleksi isu      | Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukan ( <i>included</i> ), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan ( <i>excluded</i> ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. |
| Penonjolan aspek | Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.                                                                                                              |

Sumber: Eriyanto, 2002: 222

Framing dalam konsepsi Entman pada dasarnya merujuk pada pemberi definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.221.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

Konsepsi framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Ada Entman empat perangkat framing yang didesain oleh Entman. Berikut penjelasannya:

*Define Problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame/* bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.<sup>31</sup>

*Diagnose causes* (memikirkan masalah atau sumber masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.<sup>32</sup>

*Make moral judgement* (membuat keputusan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditemukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.<sup>33</sup>

Elemen framing lain adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.<sup>34</sup>

Gambar 3

Tabel Perangkat Analisis Framing Robert N. Entman

|                                                                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Define problems</i><br>(pendefinisian masalah)                  | Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?                                                                          |
| <i>Diagnose causes</i><br>(memikirkan masalah atau sumber masalah) | Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? |
| <i>Make moral judgement</i><br>(membuat keputusan moral)           | Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?          |
| <i>Treatment recommendation</i><br>(menekankan penyelesaian)       | Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.                     |

Sumber: Eriyanto, 2002: 223-224.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum penyusunan bab dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika pembahasan terdiri atas 4 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat tentang bagian dasar dari penelitian ini. Yakni terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum, berisi uraian mengenai subjek dan objek penelitian. Yaitu seputar sejarah singkat Ijtima ulama I sampai IV. Dijelaskan pula profil media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan bagaimana pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah.

BAB III Pembahasan, pada bab ini akan memaparkan bagaimana hasil penelitian mengenai analisis framing pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah. Kemudian akan menunjukan hasil bagaimana posisi media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dalam mengkonstruksikan realitas tersebut.

BAB IV Penutup, pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini. Sekaligus menjawab pertanyaan yang di kemukakan peneliti pada penulisan awal. Saran-saran juga di cantumkan pada bab ini agar memiliki perbaikan pada penelitian berikutnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Konstruksi yang dibangun Republika.co.id terhadap pemberitaan hasil keputusan Ijtima Ulama IV tentang NKRI syariah cenderung menunjukkan sikap penolakan pada rekomendasi tersebut. Pemberitaan isu NKRI syariah pada Republika.co.id tidak dipahami sebagai upaya taat pada hukum Allah dengan tetap menjadi bangsa Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Ijtima Ulama. Melainkan dikonstruksi sebagai permasalahan ideologi. Sebagaimana digambarkan dari hasil analisis framing menggunakan empat elemen dari model Robert Entman bahwa Republika.co.id mendefinisikan isu NKRI syariah pada *define problems* sebagai masalah ideologi. Pada *diagnose causes* isu ini dilihat bertentangan dengan Pancasila. Pada *make moral judgement* menekankan pernyataan bahwa Indonesia bukan negara agama. Dalam menekankan penyelesaian Republika.co.id mengajukan *treatment recommendation* berupa penolakan terhadap rekomendasi NKRI syariah.

#### B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan tentang bagaimana media menampilkan dan memaknai suatu realitas atau isu. Realitas yang disajikan media bukanlah realitas yang apa adanya. Melainkan, dibentuk dan dikonstruksi. Saran yang peneliti dapat sampaikan yakni agar masyarakat tidak

menjadikan informasi yang disampaikan oleh media dianggap sebagai sumber kebenaran tunggal. Artinya, ada sumber lain yang mungkin bisa menguji kebenaran tersebut. Sehingga masyarakat tidak mudah terbawa isu dan arus informasi yang disampaikan oleh media.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Arwani, Muhammad, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Puisi Sukmawati dalam republika Online Edisi 3-5 April 2018*, Skripsi (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2019).
- Djuaidi, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKis, 2002.
- Eriyanto, *Analisis Naratif: Dasar Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Eriyanto, *Media dan Opini Publik: Bagaimana media Menciptakan Isu (Agenda Setting, Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Masa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Maladi Riyanto, Agus, *Media dan Kekuasaan: Antropologi Membaca Dunia Kontemporer*, tl: Gigih Pustaka Mandiri, 2014.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Peneliti: Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rizqi, Fatkhur, *Analisis Framing Robert N. Entman Terhadap Berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018).

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacan, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Rosda, 2012.

Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2006.



*Lampiran 1: Daftar Berita*

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**1. Selasa, 06 Agustus 2019, 15.57 WIB, Soal NKRI Syariah, Moeldoko:**

**Negara Kita Bukan Negara Islam**

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan tanggapannya terkait rekomendasi Ijtimak Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah. Menurut Moeldoko, rekomendasi tersebut tidak bisa dijalankan karena Indonesia bukanlah negara Islam. Ia menjelaskan, Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila. Sehingga ideologi-ideologi lainnya tak bisa dikembangkan di Tanah Air.

"Negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya, harus dilawan, gitu aja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

Ia menegaskan, Indonesia bukanlah negara ijtima ulama. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara hukum yang memiliki konsitusi, UUD 1945, dan aturan-aturan lainnya.

"Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtimak, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada Konstitusi, UUD 45, ada UU, ada perpres, ya sudah ikuti, apalagi," ucapnya.

Untuk diketahui, Ijtimak Ulama IV menghasilkan empat poin pertimbangan dan juga delapan poin rekomendasi. Salah satunya yakni meminta umat Islam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Ijtimak Ulama IV juga menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam.

"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara," bunyi poin rekomendasi.

## **2. Selasa, 06 Agustus 2019, 19.37 WIB, BPIP Respon Hasil Ijtima Ulama Soal Indonesia Bersyariah**

Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merespons hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya poin tentang NKRI yang bersyariah. BPIP mengingatkan bangsa Indonesia adalah milik bersama, bukan milik mayoritas, minoritas, atau etnis tertentu sebagai konsepsi Pancasila.

"Di sinilah perlu sebuah komitmen kearifan kita bahwa bangsa Indonesia itu milik bersama," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono usai beraudiensi

dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Jakarta, Selasa.

Hariyono mengaku belum membaca hasil ijtima ulama itu. Namun, ia menegaskan, semua harus dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila.

"Ya, kita kembali kepada konsepsi Pancasila menurut pendiri bangsa bahwa Pancasila itu adalah sebuah dasar negara bangsa Indonesia yang berbasis pada inklusivitas sehingga negara Indonesia bukan negara agama," katanya.

Artinya, kata dia, tidak boleh mengutamakan salah satu agama, sesuai dengan sila pertama Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, kata dia, sebagai negara yang tidak berbasis agama dan bukan negara sekuler, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum telah disepakati, yakni Pancasila, UUD 1945, dan perundangan yang berlaku.

"Kalau nanti masing-masing warga negara menggunakan kitab sucinya sebagai sumber hukum. Apakah keyakinan orang yang berbeda agama itu juga bisa direpresentasikan dalam keyakinan agama yang berbeda?" ujarnya.

Kendati demikian, Hariyono mengaku ijtima ulama itu juga tidak dibahas secara khusus dalam pertemuan dengan Menko Polhukam. "Tadi enggak, ya, cuma umum aja. Kita sama-sama belum membaca detailnya itu. Tetapi yang jelas justru di sini pemahaman umum tentang pancasila harus diarusutamakan," katanya.

Jadi, kata dia, tidak setiap elemen masyarakat boleh menafsirkan pancasila sesuai dengan kepentingan dan persepsinya sendiri, tetapi kepentingan bangsa yang diutamakan.

Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8), menghasilkan delapan butir kesepakatan antarulama yang hadir, salah satunya meminta agar ijtima ulama dilembagakan.

Inilah hasil Ijtima Ulama IV:

1. Menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.
2. Menolak putusan hukum yang tidak sesuai prinsip keadilan.
3. Mengajak umat berjuang dan memperjuangkan:
  - 3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama, sesuai amanat undang-undang.
  - 3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marksisme, komunisme dalam bentuk apapun.
  - 3.3. Menolak segala perwujudan kapitalisme dan liberalisme seperti penjualan aset negara kepada asing maupun aseng.
  - 3.4. Pembentukan tim investigasi tragedi pemilu 2019.
  - 3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam dan stop kriminalisasi ulama. Serta memulangkan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat apapun.

- 3.6. Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi.

4. Perlunya ijtima ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerjasama antara ormas Islam dan politik.

6. Menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya.

sumber : Antara

**3. Selasa, 06 Agustus 2019, 20.55 WIB, Wapres JK: Tak Perlu Alergi dengan Kata Syariah**

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masyarakat tidak perlu alergi terhadap kata syariah. Jangan menganggap seolah-olah segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah adalah berbahaya.

"Jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya, shalat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i, mengajar juga syariah, semua syariah. Jadi jangan merasa syari'i itu tiba-tiba bahaya, tidak begitu," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/8).

Syariah sebenarnya merupakan hukum agama Islam berdasarkan Alquran untuk mengatur kehidupan umat Muslim kepada Allah SWT. Sehingga, lanjut JK, menjalankan hukum syariah bukanlah sesuatu yang harus dipersulit, sama halnya dengan menerapkan ideologi Pancasila.

"Itu suatu hal yang sangat simpel. Jadi kalau melakukan syariah dan Pancasila, apa salahnya? Jangan terlalu itu dianggap masalah kalau ada orang yang ingin menjalankan syariah itu," jelasnya.

Dalam menjalankan kehidupan beragama Islam, selain syariah ada pula akidah dan muamalah yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga kehidupan beragama umat Muslim dapat berjalan baik.

"Kemudian ada muamalah, pada dasarnya halal selama dia tidak haram. Itu syar'i semua. Saya berpakaian begini itu syar'i, selama menutup aurat. Bukan hanya yang pakai jilbab yang syar'i," tegasnya.

Menanggapi hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya ingin mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi, Wapres mengatakan pertemuan tersebut tidak mewakili pendapat ulama secara keseluruhan.

"Ulama kita banyak. Tentu tidak bisa mengatasnamakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, itu tentu hanya ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," ujarnya.

sumber : Antara

**4. Rabu, 07 Agustus 2019, 19.23 WIB, Sindir Ijtima Ulama IV, Karding:  
Mana Ada NKRI Bersyariah**

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyindir hasil Ijtima Ulama IV yang salah satu hasilnya meminta umat Islam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Karding menegaskan, bahwa NKRI adalah harga mati.

"Mana ada Pancasila NKRI bersyariah? Nggak ada itu, Pancasila ya Pancasila aja, NKRI ya NKRI saja, nggak ada embel-embel," tegasnya.

Ia pun mengutip sebuah pernyataan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengungkapkan bahwa agama tidak boleh dibawa-bawa dalam politik. Tetapi, nilai-nilai agama harus menjadi sikap keseharian masyarakat.

"Kalau mau NKRI bersyariah atau konstitusi bersyariah jangan di Indonesia. Final. Harga mati bagi kita Pancasila dan NKRI, kalau ada yang mau lawan itu kita berhadapan, nggak ada urusan," ujarnya.

Karding juga membantah bahwa sosialisasi empat pilar yang kerap dilakukan MPR telah gagal total. Justru, menurutnya logikanya harus dibalik.

"Kita adakan (sosialisasi empat pilar) saja ini arus politik terbelah seperti ini soal khilafah, apalagi tidak kita adakan, coba bayangkan," ungkapnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung dengan sosialisasi empat pilar. Namun, ia berharap semua pihak mau sama-sama membenahi agar ancaman ideologi tidak menjadi ancaman serius kedepannya. "Oleh karena itu jangan lagi kita bawa-bawa ideologi apalagi dalam bermain politik," imbaunya.

Untuk diketahui, Ijtima Ulama IV menghasilkan empat poin pertimbangan dan juga delapan poin rekomendasi. Salah satunya yakni meminta umat Islam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Ijtima Ulama IV juga menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam.

"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara," bunyi poin rekomendasi.

## **5. Sabtu, 10 Agustus 2019, 03.08 WIB, Jimly Nilai Istilah NKRI Bersyariah Munculkan Kesalahpahaman**

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menjadi pembicara dalam acara Muhammadiyah bertajuk "Muhammadiyah dan Kemerdekaan Indonesia" di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (9/8). Dalam acara itu dia menyinggung soal "NKRI Bersyariah" yang merupakan hasil Ijtima Ulama IV.

Jimly mengawali pembahasan tersebut dengan menyinggung soal tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang pada akhirnya dihapus lalu menjadi sebagaimana pada sila pertama Pancasila sekarang, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan sebelumnya, kalimat yang menyertai kata 'Ketuhanan' yakni tujuh kata, 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'.

"Tujuh kata itu terus menerus jadi masalah sampai sekarang. Kemarin ada istilah Ijtima Ulama (IV), ada kata-kata NKRI Bersyariah. Kata-kata itu muncul lagi karena ada impian yang belum selesai tentang tujuh kata yang dicoret itu. Padahal (NKRI yang sekarang) ini sudah kesepakatan. Sekali kita sepakat ya sudah. Dalam Alquran, selain iman dan keadilan, yang juga sangat penting adalah amanah. Sikap setia pada perjanjian, kita harus setia pada janji," ujar dia saat mengisi acara.

Jimly kemudian memaparkan soal Piagam Hudaibiyah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan Kaum Quraisy. Dalam pembuatan Piagam ini Rasulullah bersusah-payah membuat kesepakatan. Hingga akhirnya terjadilah kesepakatan meski kalimat pembuka berbunyi "bismillah" dihilangkan karena ada protes dari salah seorang Yahudi. Termasuk juga kalimat 'Muhammad Rasulullah' dihilangkan menjadi 'Muhammad bin Abdullah' dalam piagam tersebut. Walaupun pada setahun kemudian perjanjian tersebut dikhianati oleh Kepala Suku dengan banyak alasan."

(Tetapi) sekali sudah berjanji, meskipun janji itu susah payah, tidak puas, kalau sudah disepakati, wajib setia. Itu yang terjadi dan diteladankan Rasulullah. Maka, boleh jadi banyak umat Islam yang tidak puas, tapi kan sudah disepakati," ujarnya.

Jimly lalu mempertanyakan kembali soal tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang akhirnya dihilangkan itu. "Apa iya sempurna betul tujuh kata itu? Tidak juga. Itu kalau didalami detail satu per satu, tidak seluruhnya positif juga. Karena bagaimana pun kita bernegara harus memperlakukan semua warga secara sama. Ya masak hanya yang Islam saja diwajibkan oleh tujuh kata itu. Yang lain kok tidak. Kan tidak adil," jelasnya.

Karena itu, Jimly mengajak umat Muslim di Indonesia agar tidak perlu lagi mendung-dungungkan kekecewaan dengan memakai narasi NKRI bersyariah. Sebab, ini menimbulkan salah paham yang tidak perlu. NKRI, kata dia, sudah final sehingga seluruh pihak harus dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jimly juga menegaskan bahwa sila pertama Pancasila itu mempersatukan bangsa Indonesia. Soal surga ataupun neraka, lanjutnya, itu urusan Allah SWT. Dan terpenting, harus saling mendoakan agar khusnul khatimah.

"Jangan mentang-mentang kita anggap orang itu tidak sama dengan kita maka dia masuk neraka padahal bisa jadi 5 menit jelang ajal dia khusnul khatimah. Kita yang merasa baik ini 5 menit jelang ajal su'ul khatimah. Maka marilah kita saling menghormati keyakinan masing-masing, yang penting kita berbuat baik dalam kehidupan bersama," ucap dia.

**6. Selasa, 10 Agustus 2019, 02.40 WIB, Wapres RI Keenam tak Sepakat Adanya NKRI Syariah**

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (wapres) RI keenam Try Sutrisno mengaku tidak mengetahui istilah NKRI bersyariah. Dia mengatakan, NKRI sejak dahulu berideologi Pancasila.

Menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat itu bersifat pribadi. "Seorang Islam syariat Islam dilaksanakan. Seorang Kristen melaksanakan ajaran Kristen. Seorang Budha melaksanakan ajaran Budha, seorang Hindu melaksanakan ajaran hindu," kata Try Sutrisno di Jakarta, Senin (12/8).

Dia mengatakan, Indonesia tidak memiliki larangan untuk melakukan hal yang bersifat pribadi. Dia melanjutkan, setiap warga negara Indonesia berhak melakukan apapun berdasarkan ajaran agamanya.

"Sangat bebas, tidak perlu diganggu ibadahnya," kata mantan jenderal TNI ini.

Yang pasti, dia mengatakan, sesama warga negara melaksanakan Pancasila. Dia berpendapat, ideologi bangsa itu bukan sesuatu yang hanya bersifat teoritis namun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Cita-cita kita merdeka itu untuk Indonesia, ragam agama, suku bermacam-macam budaya," katanya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama GNPF keempat pada Senin (5/8) lalu di Sentul merekomendasikan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila. GNPF berpendapat, syariat Islam termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

#### **7. Senin, 12 Agustus 2019, 16:14 WIB, Ketua PA 212 Jelaskan NKRI Syariah Hanya Istilah**

Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PA 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Ia menegaskan Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.

"Itu cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. UUD 45 ilang? Ya enggaklah," kata Haikal usai menghadiri acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa tentang Pancasila di Jakarta, Senin (12/8).

Butir 3.6 dalam Ijtima Ulama IV berisi kalimat "Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi". Menurut Haikal, arti NKRI syariah yang dimaksudkan adalah tetap taat pada Allah SWT dengan tetap menjadi bangsa Indonesia.

"Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" ucapnya.

Menurut dia, NKRI sudah bersyariah hal ini ditunjukkan adanya lembaga syariah, peraturan syariah, dan lainnya. "NKRI bersyariah, iya dong, masak enggak bersyariah. Apa kamu enggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah," tuturnya.

Ketika ditanya apakah istilah NKRI bersyariah bertentangan dengan Pancasila, dengan tegas ia menjawab tidak. "Enggak ada dong. Enggak ada bertentangan," ujar Haikal.

Saat ditanya soal arti jaga jarak dalam butir pertama rumusan Ijtima Ulama IV apakah berarti tidak mengakui pemerintahan saat ini, Haikal menjelaskan arti kata jaga jarak sebagai kata oposisi bukan tidak mengakui pemerintahan saat ini. "Bukan tidak mengakui, jangan salah. Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, karena kita tetap milih oposisi. Tolong jaga jarak diartikan sebagai oposisi," katanya.

Adapun, isi butir pertama Ijtima Ulama IV yakni "Menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut". Menurut Haikal,

menjaga jarak dalam butir pertama rumusan Ijtima Ulama IV bisa juga diartikan memantau.

"Kalau ada di dalam enggak bisa. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui, kalo tidak mengakui bagaimana kita merdeka, masa kita bisa berdiri sendiri, bukan begitu," kata Haikal.

Selain Haikal, acara Silaturahmi dan Dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kemhan RI dan Forum Rekat Anak Bangsa, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid (Gus Solah) serta sejumlah ulama dan para pejabat Kemhan. Sebelumnya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahudin Wahid atau Gus Solah mengatakan tidak perlu ada istilah NKRI bersyariah karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia.

"Syariat Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah syariah, syariat Islam jalan jadi tidak perlu ada istilah itu," kata Gus Solah.

sumber : Antara

**8. Rabu, 14 Agustus 2019, 15:29 WIB, Respon Ide NKRI Bersyariah, Din: Jangan Beri Ruang**

Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Karena, menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia.

"Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini di Solo, Rabu (14/8). Din mengatakan, Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama. "Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa', ditambah UUD 1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing,"katanya.

Ia mengatakan, NKRI sudah menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia menjadi negarasyariat.

"Apalagi di agama tertentu jangan ada salah pemahaman. Termasuk kalau ada warga negara yang mau menjalankan ibadah, seperti contoh perempuan berjilbab mengamalkan Pancasila. Justru yang mengecam itu yang antipancasila. Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yang berpegang pada pancasila," katanya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.

Ia mengatakan, bukan berarti dengan adanya NKRI bersyariah akan menghilangkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, NKRI saat ini sudah bersyariah, ditunjukkan dari adanya lembaga syariah dan peraturan syariah.

Sementara itu, pada kunjungannya ke Kampus UNS beberapa waktu lalu, Menteri

Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak ada istilah NKRI bersyariah. "NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi," katanya.



*Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

Nama : Umi Mungajubah  
 Tempat/tgl. Lahir : Kebumen, 15 April 1996  
 Alamat : Jogomertan Rt.04 Rw.03,  
 Petanahan, Kebumen  
 Nama Ayah : Rokhmat Haryanto  
 Nama Ibu : Solikhah



**B. Riwayat Pendidikan**

- a. SD N 2 Jogomertan, 2008
- b. SMP N 1 Klirong, 2011
- c. SMA N 1 Pejagoan, 2014

**C. Pengalaman Organisasi**

Anggota UKM Jamaah Cinema Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 9 November 2019

Umi Mungajubah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MAHASISWA**



**UMI MUNGAJUBAH**

15210085

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Komunikasi dan Penyiaran Islam - S1



Yogyakarta, 9 Juli



Dr. Phil Sahiron

Berlaku s.d.  
**31 Agustus 2020**

*Lampiran 3: KTM*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Lampiran 4: KRS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281  
 Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email. fd@uin-suka.ac.id



---

NIM : 15210085  
 NAMA : UMI MUNGAJUBAH

TA : 2019/2020  
 SMT : SEMESTER GENAP

PRODI : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 NAMA DPA : Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si

| No. | Nama Mata Kuliah    | SKS | Kls | Jadwal Kuliah             | No. Ujian | Pengampu                   | Paraf UTS | Paraf UAS |
|-----|---------------------|-----|-----|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Skripsi/Tugas Akhir | 6   | A   | MIN 07:00-12:00 R: PD-304 | 0         | Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. | ...       | ...       |

Catatan Dosen Penasihat Akademik:

Mahasiswa  
  
 UMI MUNGAJUBAH  
 NIM: 15210085

Sks Ambil : 6/16

Yogyakarta, 15/01/2020  
 Dosen Penasihat Akademik  
  
 Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati,  
 M.Si  
 NIP: 19640923 199203 2 001

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY

# SUNAN KALIJAGA

# YOGYAKARTA

1/1
03/07/2020

## Lampiran 5: KHS



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281  
Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email. fd@uin-suka.ac.id

**Hasil Studi Kumulatif Mahasiswa**

NIM : 15210085 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Nama Mahasiswa : UMI MUNGAJUBAH Tahun Akademik : 2020/2021  
Nama DPA : Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si Semester : SEMESTER GANJIL

| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah                             | SMT | SKS | Nilai | Bobot | Harkat |
|-----|------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1.  | PTI00005         | Akhlaq-Tasawuf                               | 1   | 2   | B+    | 3,25  | 6,50   |
| 2.  | PTI00002         | Al-Qur'an/Al-Hadits                          | 1   | 3   | B     | 3,00  | 9,00   |
| 3.  | PTU00001         | Bahasa Inggris                               | 1   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 4.  | USK01002         | Filsafat Ilmu                                | 1   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 5.  | FDY03001         | Ilmu Dakwah                                  | 1   | 2   | B+    | 3,25  | 6,50   |
| 6.  | NAS00001         | Pancasila                                    | 1   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 7.  | KPI02014         | Pengantar Ilmu Komunikasi                    | 1   | 3   | A     | 4,00  | 12,00  |
| 8.  | USK01001         | Pengantar Studi Islam                        | 1   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 9.  | PTI00004         | Tauhid                                       | 1   | 2   | A     | 4,00  | 8,00   |
| 10. | PTI00001         | Bahasa Arab                                  | 2   | 2   | A/B   | 3,50  | 7,00   |
| 11. | PTI00003         | Fikih/Usul Fikih                             | 2   | 2   | A     | 4,00  | 8,00   |
| 12. | FDY03006         | Hadis Dakwah                                 | 2   | 2   | B     | 3,00  | 6,00   |
| 13. | NAS00002         | Kewarganegaraan                              | 2   | 2   | A/B   | 3,50  | 7,00   |
| 14. | KPI02005         | Komunikasi Massa                             | 2   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 15. | KPI02007         | Komunikasi Politik                           | 2   | 2   | A     | 4,00  | 8,00   |
| 16. | PTI00006         | Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal    | 2   | 3   | A     | 4,00  | 12,00  |
| 17. | KPI05059         | Studi Agama Kontemporer                      | 2   | 2   | A/B   | 3,50  | 7,00   |
| 18. | FDY03005         | Tafsir Ayat Dakwah                           | 2   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 19. | KPI02019         | Teori Komunikasi                             | 2   | 3   | A/B   | 3,50  | 10,50  |
| 20. | KPI02001         | Desain Komunikasi Visual                     | 3   | 3   | A-    | 3,75  | 11,25  |
| 21. | KPI05056         | Fikih Kontemporer                            | 3   | 2   | A/B   | 3,50  | 7,00   |
| 22. | KPI02002         | Filsafat-Etika Komunikasi                    | 3   | 3   | B+    | 3,25  | 9,75   |
| 23. | FDY03007         | Fiqh Al-Dakwah                               | 3   | 3   | B+    | 3,25  | 9,75   |
| 24. | KPI02004         | Komunikasi Kelompok                          | 3   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 25. | KPI02006         | Komunikasi Organisasi                        | 3   | 2   | B+    | 3,25  | 6,50   |
| 26. | KPI02015         | Pengantar Jurnalistik                        | 3   | 2   | A     | 4,00  | 8,00   |
| 27. | KPI445017        | Periklanan                                   | 3   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 28. | KPI02016         | Psikologi Komunikasi                         | 3   | 3   | A/B   | 3,50  | 10,50  |
| 29. | FDY03003         | Sejarah Dakwah                               | 3   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 30. | NAS400001        | Bahasa Indonesia                             | 4   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 31. | KPI444022        | Hukum Dan Etika Penyiaran                    | 4   | 2   | B+    | 3,25  | 6,50   |
| 32. | KPI444024        | Jurnalistik Penyiaran                        | 4   | 3   | A-    | 3,75  | 11,25  |
| 33. | KPI405025        | Kewirausahaan                                | 4   | 3   | A-    | 3,75  | 11,25  |
| 34. | KPI02003         | Komunikasi Antar Budaya                      | 4   | 2   | A-    | 3,75  | 7,50   |
| 35. | KPI405027        | Metodologi Penelitian Sosial                 | 4   | 2   | A/B   | 3,50  | 7,00   |
| 36. | KPI404028        | Psikologi Dakwah                             | 4   | 2   | A     | 4,00  | 8,00   |
| 37. | KPI444030        | Reportase Media Penyiaran                    | 4   | 3   | A     | 4,00  | 12,00  |
| 38. | KPI405031        | Retorika Dakwah                              | 4   | 2   | B+    | 3,25  | 6,50   |
| 39. | KPI444036        | Manajemen Siaran                             | 5   | 3   | A     | 4,00  | 12,00  |
| 40. | KPI444037        | Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif | 5   | 3   | A-    | 3,75  | 11,25  |

| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah                            | SMT        | SKS | Nilai         | Bobot | Harkat |
|-----|------------------|---------------------------------------------|------------|-----|---------------|-------|--------|
| 41. | KPI444038        | Newscasting/Announcing                      | 5          | 3   | A-            | 3,75  | 11,25  |
| 42. | KPI444040        | Produksi Acara Berita                       | 5          | 3   | A             | 4,00  | 12,00  |
| 43. | KPI444042        | Sinematografi                               | 5          | 3   | A-            | 3,75  | 11,25  |
| 44. | KPI02018         | Sosiologi Komunikasi                        | 5          | 2   | A             | 4,00  | 8,00   |
| 45. | KPI444043        | Tata Artistik Produksi Siaran               | 5          | 3   | A/B           | 3,50  | 10,50  |
| 46. | KPI444044        | Teknik Editing                              | 5          | 3   | A-            | 3,75  | 11,25  |
| 47. | KPI444045        | Analisis Siaran                             | 6          | 3   | B             | 3,00  | 9,00   |
| 48. | KPI404047        | Manajemen Media Massa                       | 6          | 3   | C             | 2,00  | 6,00   |
| 49. | KPI404048        | Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif | 6          | 3   | A/B           | 3,50  | 10,50  |
| 50. | KPI444050        | Penulisan Naskah Siaran                     | 6          | 3   | A-            | 3,75  | 11,25  |
| 51. | KPI444051        | Produksi Acara Siaran                       | 6          | 3   | A/B           | 3,50  | 10,50  |
| 52. | KPI404053        | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi   | 6          | 3   | A/B           | 3,50  | 10,50  |
| 53. | KPI404054        | Statistik Sosial                            | 6          | 3   | B-            | 2,75  | 8,25   |
| 54. | KPI404055        | Magang Profesi                              | 7          | 4   | A             | 4,00  | 16,00  |
| 55. | KPI404056        | Seminar Komunikasi                          | 7          | 3   | A             | 4,00  | 12,00  |
| 56. | USK402001        | Kuliah Kerja Nyata                          | 8          | 4   | A             | 4,00  | 16,00  |
| 57. | USK403007        | Skripsi/Tugas Akhir                         | 8          | 6   | A-            | 3,75  | 22,50  |
|     |                  |                                             | <b>148</b> |     | <b>535,25</b> |       |        |

Hasil Studi Sampai Semester Ini :

Jumlah SKS Kumulatif : 148  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,62

Yogyakarta, 4 Januari 2021

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si.  
NIP: 19680103 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Lampiran 6: Sertifikat KKN

80



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT**

Nomor: B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.643/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nama                      | : Umi Mungajubah         |
| Tempat, dan Tanggal Lahir | : Kebumen, 15 April 1996 |
| Nomor Induk Mahasiswa     | : 15210085               |
| Fakultas                  | : Dakwah dan Komunikasi  |

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Lokasi         | : Sawah, Krambilawit |
| Kecamatan      | : Saptosari          |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Gunungkidul   |
| Propinsi       | : D.I. Yogyakarta    |

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,45 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 02 Oktober 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19720912 200112 1 002

## Lampiran 7: Serifikat Sospem



*Lampiran 8: Sertifikat Toefl*



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

---

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.6.7/2019

This is to certify that:

Name : **Umi Mungajubah**  
 Date of Birth : **April 15, 1996**  
 Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **August 02, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

| CONVERTED SCORE                |            |
|--------------------------------|------------|
| Listening Comprehension        | 45         |
| Structure & Written Expression | 44         |
| Reading Comprehension          | 45         |
| <b>Total Score</b>             | <b>447</b> |

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, August 02, 2019  
Director



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005



## Lampiran 9: Sertifikat IKLA

**شهادة**  
**اختبار كفاءة اللغة العربية**  
الرقم: JIN.02/L4/PM.03.2/6.21.12.2/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Umi Mungajubah :  
تاريخ الميلاد : ١٥ أبريل ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ يوليو ٢٠١٩، وحصلت على درجة :

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| ٤٤  | فهم المسموع                          |
| ٣٥  | التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية |
| ٢٨  | فهم المقروء                          |
| ٣٥٧ | مجموع الدرجات                        |

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جو كجا كرتا، ١٨ يوليو ٢٠١٩  
المدير

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥

KEMENTERIAN AGAMA  
YOGYAKARTA  
REPUBLIC OF INDONESIA





## Lampiran 10: ICT



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
Pusat Pengembangan Bahasa

# SERTIFIKAT

Nomor: 2499.5/Un.02/L4/PM.03.2/06/2016

diberikan kepada:

**UMI MUNGAJUBAH**  
NIM: 15210085

yang telah mengikuti program Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab/Pelatihan IKLA (Ikhtibār Kafā'ah al-Lughāh al-'Arabiyyah) pada tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Mei 2016 di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga dengan hasil sebagai berikut

| KONVERSI NILAI     |            |
|--------------------|------------|
| Istimāk            | 48         |
| Tarākīb            | 34         |
| Fahmul Maqrū'      | 40         |
| <b>TOTAL NILAI</b> | <b>406</b> |

**Keterangan**

Sertifikat ini sebagai syarat untuk mengambil tes IKLA (tes kelengkapan untuk ujian munawqasah)

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005

Lampiran 11: Ijazah SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**IJAZAH**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MENGESAHKAN  
Kopirasi sesuai dengan aslinya  
KEPALA SEKOLAH  
SMA NEGERI 1 PEJAGOAN  
H. AGUS SUNARYO S.Pd, M.Pd  
19691208 200803 1 006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas .....  
*Negeri 1 Pejagoan* ..... menerangkan bahwa:

nama : *UMI MUNGAJUBAH*  
tempat dan tanggal lahir : *Kebumen, 15 April 1996*  
nama orang tua/wali : *Rokhmah Haryanto*  
nomor induk siswa nasional : *9963131927*  
nomor peserta ujian nasional : *3-14-03-11-008-098-7*  
sekolah asal : *SMA Negeri 1 Pejagoan*

**LULUS**

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebumen, 20 Mei ..... 2014  
Kepala Sekolah,  
*Agus Sunaryo, S.Pd, M.Pd*  
19691208 200803 1 006

DN-03 Ma 0018899

Kepulauan Kepala Sekolah Promosi dan Pengembangan  
Nomor : 012/HK/2014 Tanggal 21 Maret 2014